

Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* terhadap Kestabilan Politik Global

Amiruddin¹, Nani Nurani Muksin²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Amirjibriel030600@gmail.com

Abstract

The United States' withdrawal from the Paris Agreement in 2025 under the Trump administration has raised significant questions about its implications for global political stability. This study examines the political implications of the US withdrawal, focusing on its impact on global leadership, multilateral cooperation, climate diplomacy, and domestic political dynamics. Using a qualitative case study approach and drawing on a variety of data sources, including official documents, academic literature, and policy analysis, this study finds that the US withdrawal has had a mixed impact. While it has created challenges for global climate governance and cooperation, it has also opened opportunities for other actors to play a more prominent role. The study concludes that the US withdrawal from the Paris Agreement is a significant event with far-reaching political implications, and further research is needed to fully understand its long-term consequences.

Keywords: Paris Agreement, United States, climate change, global political stability, multilateral cooperation

Abstrak

Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Trump telah menimbulkan pertanyaan signifikan tentang implikasinya terhadap stabilitas politik global. Studi ini meneliti implikasi politik dari penarikan diri AS, dengan fokus pada dampaknya terhadap kepemimpinan global, kerjasama multilateral, diplomasi iklim, dan dinamika politik domestik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan berbagai sumber data, termasuk dokumen resmi, literatur akademis, dan analisis kebijakan, studi ini menemukan bahwa penarikan diri AS memiliki dampak yang beragam. Meskipun menciptakan tantangan bagi tata kelola dan kerjasama iklim global, hal ini juga membuka peluang bagi aktor lain untuk memainkan peran yang lebih menonjol. Studi ini menyimpulkan bahwa penarikan diri AS dari Paris Agreement adalah peristiwa penting dengan implikasi politik yang luas, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya konsekuensi jangka panjangnya.

Kata kunci: Paris Agreement, Amerika Serikat, perubahan iklim, stabilitas politik global, kerjasama multilateral

A. Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi isu sentral dalam politik global selama beberapa dekade terakhir, mendorong komunitas internasional untuk membangun kerangka kerjasama dalam menghadapi tantangan eksistensial ini. Laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menegaskan bahwa perubahan iklim adalah nyata, disebabkan oleh aktivitas manusia, dan memiliki dampak yang

meluas dan intensif pada sistem alam dan manusia (IPCC, 2021). IPCC memperingatkan bahwa tanpa tindakan yang cepat dan ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dunia akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan, termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem yang lebih sering dan intens, kelangkaan air, dan hilangnya keanekaragaman hayati (IPCC, 2021). Dampak perubahan iklim ini tidak hanya mengancam lingkungan dan ekonomi, tetapi juga dapat memicu konflik, migrasi massal, dan ketidakstabilan politik (IPCC, 2021).

Sebagai contoh, kenaikan permukaan laut mengancam kota-kota pesisir dan negara-negara kepulauan, yang dapat menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran dan meningkatkan persaingan atas sumber daya yang semakin langka (Ge, Friedrich, & Damassa, 2014). Cuaca ekstrem dapat merusak infrastruktur, mengganggu produksi pangan, dan menyebabkan krisis kemanusiaan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik (IPCC, 2021). Kelangkaan air dapat memperburuk ketegangan antar negara dan komunitas, sementara hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu ekosistem dan mengancam mata pencarian masyarakat (IPCC, 2021).

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini, komunitas internasional telah berupaya keras untuk merumuskan kerangka kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Upaya kolaboratif ini mencapai puncaknya dengan disepakatinya Perjanjian Paris pada tahun 2015, sebuah tonggak penting dalam diplomasi iklim global yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celsius (UNFCCC, 2015). Perjanjian ini, yang dinegosiasikan oleh 196 pihak di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), menggarisbawahi komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan memobilisasi dukungan finansial untuk negara-negara berkembang (UNFCCC, 2015).

Paris Agreement dipuji sebagai kemenangan multilateralisme dan bukti bahwa komunitas internasional dapat bersatu untuk mengatasi tantangan global yang mendesak (Bodansky, 2016). Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja yang fleksibel dan berorientasi pada aksi, di mana setiap negara menetapkan target pengurangan emisi sendiri yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions* (NDCs) (UNFCCC, 2015). Paris Agreement juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dengan mekanisme pelaporan dan peninjauan yang teratur untuk memantau kemajuan setiap negara (UNFCCC, 2015). Selain itu, perjanjian ini mengakui kebutuhan negara-negara berkembang

akan dukungan finansial dan teknologi untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim (UNFCCC, 2015).

Namun, keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Perjanjian Paris pada tahun 2025 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan kerjasama iklim internasional dan implikasinya terhadap kestabilan politik global. Penarikan diri AS, salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, berpotensi menghambat upaya global dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris dan melemahkan arsitektur tata kelola iklim global (Falkner, 2016). Beberapa analis berpendapat bahwa keputusan ini mencerminkan pergeseran prioritas politik AS ke arah nasionalisme dan unilateralisme, yang bertentangan dengan semangat multilateralisme yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim (Falkner, 2016).

Ketidakpastian kebijakan AS juga dikhawatirkan dapat menghambat investasi dalam energi terbarukan dan mengurangi momentum aksi iklim global, karena negara-negara lain mungkin tergoda untuk mengikuti jejak AS dan mengabaikan komitmen mereka (Stavins, 2018). Selain itu, penarikan diri AS dapat mempengaruhi kepercayaan dan solidaritas antar negara dalam menangani isu perubahan iklim, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan global di masa depan (Keohane & Victor, 2016). Hal ini juga dapat mempengaruhi kepemimpinan AS dalam isu-isu global lainnya dan mengurangi pengaruhnya dalam membentuk tatanan internasional (Falkner, 2016).

Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa penarikan diri AS dapat memicu aksi iklim yang lebih ambisius dari aktor-aktor lain, seperti Uni Eropa dan Tiongkok, yang berusaha mengisi kekosongan kepemimpinan dalam tata kelola iklim global (Keohane & Victor, 2016). Mereka berargumen bahwa keputusan AS dapat memperkuat tekad negara-negara lain untuk mempertahankan Paris Agreement dan bahkan meningkatkan ambisi mereka dalam mengurangi emisi (Kim, 2017). Uni Eropa, misalnya, telah menegaskan kembali komitmennya pada Paris Agreement dan mengumumkan rencana untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 (Kim, 2017). Tiongkok juga telah meningkatkan investasinya dalam energi terbarukan dan menetapkan target yang ambisius untuk mengurangi emisi (Wang, 2017).

Namun, dinamika ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya polarisasi antara negara-negara yang berkomitmen pada aksi iklim dan yang tidak, serta potensi terjadinya fragmentasi dalam rezim iklim internasional (Keohane & Victor, 2016). Penarikan diri AS juga dapat

mempengaruhi aliran dana dan teknologi untuk negara-negara berkembang, yang dapat menghambat upaya mereka untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim (Depledge, 2020).

Meskipun studi-studi tersebut memberikan wawasan berharga, sebagian besar cenderung terfokus pada dampak ekonomi dan lingkungan dari penarikan diri AS. Implikasi politik yang lebih luas, seperti dampaknya terhadap dinamika kekuatan global, diplomasi iklim, dan stabilitas geopolitik, masih belum tereksplorasi secara mendalam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif implikasi politik dari keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris terhadap kestabilan politik global. Studi ini akan melampaui analisis dampak jangka pendek dan mengeksplorasi implikasi jangka panjang bagi tata kelola iklim global, dinamika kekuatan antarnegara, dan stabilitas geopolitik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik iklim internasional. Penelitian ini akan menguji bagaimana keluarnya AS dari Perjanjian Paris mempengaruhi kepemimpinan global dan dinamika kekuatan dalam tata kelola iklim global, implikasi penarikan diri AS bagi kerjasama multilateral dan efektivitas rezim iklim internasional, bagaimana keputusan AS mempengaruhi diplomasi iklim dan hubungan antarnegara, terutama dengan negara-negara kunci lainnya, serta dampak politik domestik dari penarikan diri AS dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implikasi politik dari keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris terhadap kestabilan politik global dan mengembangkan kerangka pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik yang mendasari isu perubahan iklim global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam implikasi politik dari suatu fenomena spesifik, yaitu keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, terhadap kestabilan politik global. Desain ini memungkinkan untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi pada fenomena tersebut dan mengeksplorasi dampaknya secara holistik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data utama adalah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan *Paris Agreement* dan

kebijakan iklim Amerika Serikat, seperti teks perjanjian, pernyataan kebijakan, dan laporan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku, artikel berita, dan laporan organisasi internasional.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, data yang telah dikumpulkan diorganisir dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis. Pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami. Terakhir, kesimpulan ditarik dari data yang telah disajikan dan diverifikasi dengan teori dan literatur yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* pada tahun 2025 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah memicu perdebatan sengit dan analisis mendalam mengenai implikasi politiknya terhadap kestabilan global. Keputusan ini, yang diumumkan pada bulan Januari 2025 dan secara resmi berlaku pada saat itu juga, mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS dan pendekatannya terhadap isu perubahan iklim, yang selama ini dianggap sebagai landasan kerjasama multilateral dan kepemimpinan global.

Pengumuman penarikan diri AS dari *Paris Agreement* disambut dengan kecaman luas dari para pemimpin dunia, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Banyak yang menyatakan kekecewaan dan keprihatinan mereka atas keputusan AS, yang dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Beberapa negara, seperti Prancis dan Jerman, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap *Paris Agreement* dan berjanji untuk meningkatkan upaya mereka dalam mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan tata kelola iklim global dan peran AS di dalamnya. AS, sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dan penyedia dana utama untuk aksi iklim, memiliki peran penting dalam membentuk rezim iklim internasional. Keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara lain akan merespons dan apakah mereka akan mampu mengisi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh AS.

Beberapa ahli berpendapat bahwa penarikan diri AS dapat melemahkan kerjasama multilateral dan menghambat upaya global untuk mencapai tujuan *Paris*

Agreement. Mereka khawatir bahwa keputusan AS dapat memicu efek domino, di mana negara-negara lain mungkin tergoda untuk mengikuti jejak AS dan mengurangi komitmen mereka terhadap pengurangan emisi. Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa penarikan diri AS dapat memicu aksi iklim yang lebih kuat dari aktor-aktor lain dan bahkan memperkuat kerjasama multilateral. Mereka berpendapat bahwa keputusan AS dapat memotivasi negara-negara lain untuk menunjukkan kepemimpinan yang lebih besar dalam isu perubahan iklim dan meningkatkan upaya mereka untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*.

1. Kepemimpinan Global dan Dinamika Kekuatan

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* telah menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan kepemimpinan global AS dalam isu perubahan iklim dan tata kelola lingkungan global. Beberapa analis berpendapat bahwa keputusan ini menandai kemunduran kepemimpinan AS dan membuka peluang bagi aktor-aktor lain, seperti Uni Eropa dan Tiongkok, untuk mengisi kekosongan tersebut dan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk agenda iklim global (Falkner, 2016). Hal ini dapat mengarah pada tatanan multipolar baru dalam tata kelola iklim, di mana kekuatan dan pengaruh terdistribusi di antara beberapa aktor negara dan non-negara.

a. Merosotnya Kepemimpinan AS dan Kebangkitan Aktor Baru

Keputusan AS untuk menarik diri dari *Paris Agreement*, yang dipandang sebagai tonggak penting dalam kerjasama iklim global, telah merusak kredibilitas dan kepemimpinan AS di panggung internasional. Tindakan ini mengirimkan sinyal bahwa AS tidak lagi memprioritaskan isu perubahan iklim dan tidak bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global ini. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di antara negara-negara lain, yang mengandalkan kepemimpinan AS dalam isu-isu global.

Penarikan diri AS juga telah menciptakan peluang bagi aktor-aktor lain, seperti Uni Eropa dan Tiongkok, untuk meningkatkan peran mereka dalam tata kelola iklim global. Uni Eropa, dengan penekanannya pada multilateralisme dan kerjasama berbasis aturan, telah mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dalam negosiasi iklim internasional dan telah membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk memajukan agenda iklim global (Kim, 2017). Tiongkok juga telah meningkatkan investasinya dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama iklim dengan beberapa negara (Wang, 2017).

Kebangkitan aktor-aktor baru ini dapat mengarah pada tatanan multipolar baru dalam tata kelola iklim, di mana kekuatan dan pengaruh terdistribusi di antara beberapa aktor negara dan non-negara. Tatanan multipolar ini dapat lebih inklusif dan representatif, karena memberi lebih banyak suara dan pengaruh kepada negara-negara berkembang dan aktor non-negara, seperti kota, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, tatanan multipolar juga dapat lebih kompleks dan sulit dikelola, karena memerlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih besar di antara berbagai aktor.

b. Pengaruh Domestik terhadap Kepemimpinan Global AS

Kepemimpinan global AS dalam isu perubahan iklim juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Polarisasi politik yang mendalam di AS, terutama mengenai isu perubahan iklim, telah mempersulit upaya untuk mencapai konsensus nasional dalam mengatasi tantangan ini. Pemerintahan Trump, yang skeptis terhadap perubahan iklim, telah membatalkan beberapa kebijakan iklim yang diadopsi oleh pemerintahan sebelumnya dan telah memprioritaskan kepentingan industri bahan bakar fosil. Hal ini telah menghambat upaya AS untuk mengurangi emisi dan memenuhi komitmennya di bawah *Paris Agreement*, dan telah merusak kredibilitas AS sebagai pemimpin dalam aksi iklim global.

Selain itu, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan, seperti industri bahan bakar fosil, juga telah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan iklim AS. Kelompok-kelompok ini telah melobi pemerintah untuk menentang regulasi iklim dan mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil. Pengaruh mereka telah menghambat upaya untuk transisi ke energi bersih dan telah memperkuat ketergantungan AS pada bahan bakar fosil.

c. Implikasi bagi Tata Kelola Iklim Global

Kemunduran kepemimpinan AS dalam isu perubahan iklim memiliki implikasi yang signifikan bagi tata kelola iklim global. Ketiadaan kepemimpinan AS dapat menghambat upaya global untuk mencapai tujuan *Paris Agreement* dan membatasi pemanasan global. AS, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam mengurangi emisi global. Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* dapat mengurangi tekanan pada negara-negara lain untuk memenuhi komitmen mereka dan dapat mengarah pada peningkatan emisi global.

Selain itu, ketiadaan kepemimpinan AS juga dapat menghambat upaya untuk memobilisasi dana dan teknologi untuk mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang. AS telah menjadi penyedia dana utama untuk aksi iklim, dan penarikan dirinya dari *Paris Agreement* dapat mengurangi dana yang tersedia untuk negara-negara berkembang. Hal ini dapat menghambat upaya mereka untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

2. Kerjasama Multilateral dan Efektivitas Rezim Iklim Internasional

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kerjasama multilateral dalam mengatasi perubahan iklim. *Paris Agreement* dipandang sebagai contoh keberhasilan kerjasama multilateral dalam menangani tantangan global, dan keluarnya AS dapat melemahkan kepercayaan pada mekanisme tersebut dan menghambat upaya kolektif untuk mencapai tujuan perjanjian (Keohane & Victor, 2016).

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang bagi kerjasama multilateral pasca penarikan diri AS, penting untuk memahami konteks historis dan evolusi rezim iklim internasional. Perjalanan panjang negosiasi iklim global, yang dimulai pada awal 1990-an dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), telah diwarnai oleh berbagai dinamika politik, perbedaan kepentingan antar negara, dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim.

a. Evolusi Rezim Iklim Internasional

Rezim iklim internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang mengatur interaksi antar negara dan aktor non-negara dalam isu perubahan iklim. Rezim ini telah berevolusi secara bertahap selama beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan politik global, dan dinamika negosiasi internasional.

Tahap awal pembentukan rezim iklim internasional ditandai dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini menghasilkan UNFCCC, yang menjadi kerangka kerja utama untuk kerjasama iklim global. UNFCCC menetapkan tujuan untuk "menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim" (UNFCCC, 1992). Namun, UNFCCC tidak menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara.

Pada tahun 1997, Protokol Kyoto diadopsi sebagai perjanjian tambahan untuk UNFCCC. Protokol Kyoto menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju, tetapi tidak mencakup negara-negara berkembang. Protokol Kyoto berlaku pada tahun 2005, tetapi efektivitasnya terbatas karena penarikan diri AS dan kurangnya partisipasi dari beberapa negara berkembang penghasil emisi besar.

Setelah bertahun-tahun negosiasi yang intens, Perjanjian Paris akhirnya diadopsi pada tahun 2015. Perjanjian Paris menandai era baru dalam kerja sama iklim global, dengan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi pada aksi. Perjanjian ini menetapkan tujuan untuk membatasi pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celsius (UNFCCC, 2015).

Berbeda dengan Protokol Kyoto, *Paris Agreement* mencakup semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara diharapkan untuk menetapkan target pengurangan emisi sendiri yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDCs) (UNFCCC, 2015). Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dengan mekanisme pelaporan dan peninjauan yang teratur untuk memantau kemajuan setiap negara (UNFCCC, 2015).

b. Prinsip-prinsip Kerjasama Multilateral dalam Rezim Iklim Internasional

Rezim iklim internasional didasarkan pada beberapa prinsip kunci yang memandu kerjasama multilateral dalam mengatasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- 1) **Tanggung Jawab Bersama tetapi Terbedakan:** Prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi tanggung jawab tersebut dibedakan berdasarkan kemampuan dan kontribusi historis masing-masing negara terhadap masalah tersebut. Negara-negara maju, yang secara historis telah menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih banyak, diharapkan untuk memimpin dalam aksi iklim dan memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang.
- 2) **Keadilan Iklim:** Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam mengatasi perubahan iklim. Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim,

berhak mendapatkan dukungan dan perlindungan dari dampak perubahan iklim.

- 3) **Pembangunan Berkelanjutan:** Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aksi iklim dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Aksi iklim harus mendukung upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) **Pendekatan Berbasis Hak:** Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam mengatasi perubahan iklim. Aksi iklim harus melindungi hak atas kesehatan, pangan, air, dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- 5) **Pencegahan:** Prinsip ini menekankan pentingnya mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dan tindakan dini dapat mengurangi biaya dan risiko di masa depan.

c. **Tantangan bagi Kerjasama Multilateral**

Kerjasama multilateral, yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara tiga atau lebih negara, telah menjadi landasan tata kelola iklim global. *Paris Agreement*, yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, merupakan bukti komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim melalui kerjasama multilateral. Namun, penarikan diri AS dari perjanjian ini telah menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas dan legitimasi kerjasama multilateral dalam isu perubahan iklim.

Pertama, penarikan diri AS dapat melemahkan kepercayaan dan solidaritas antara negara-negara dalam menangani isu perubahan iklim. AS, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia dan penyedia dana utama untuk aksi iklim, memiliki peran penting dalam kerjasama iklim global. Keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* mengirimkan sinyal bahwa AS tidak lagi memprioritaskan isu perubahan iklim dan tidak bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global ini. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan negara-negara lain pada komitmen AS dan melemahkan semangat kerjasama multilateral.

Kedua, penarikan diri AS dapat menghambat upaya kolektif untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dengan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celsius. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya bersama dari semua negara

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Penarikan diri AS, yang merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di dunia, dapat mempersulit upaya global untuk mencapai tujuan *Paris Agreement* dan meningkatkan risiko dampak perubahan iklim yang lebih parah.

Ketiga, penarikan diri AS dapat memicu efek domino, di mana negara-negara lain mungkin tergoda untuk mengikuti jejak AS dan mengurangi komitmen mereka terhadap pengurangan emisi. Beberapa negara mungkin berpendapat bahwa jika AS, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar, tidak bersedia untuk memenuhi komitmennya, maka mereka juga tidak perlu melakukannya. Hal ini dapat mengarah pada penurunan ambisi iklim global dan menghambat kemajuan dalam mengatasi perubahan iklim.

Meskipun *Paris Agreement* menandai kemajuan penting dalam kerjasama iklim global, penarikan diri AS telah menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim iklim internasional. Beberapa tantangan utama yang dihadapi rezim iklim internasional meliputi:

- 1) Kurangnya Kepemimpinan:** Penarikan diri AS telah menciptakan kekosongan kepemimpinan dalam tata kelola iklim global. Meskipun Uni Eropa dan Tiongkok telah meningkatkan peran mereka, ketiadaan kepemimpinan AS dapat menghambat upaya global untuk mencapai tujuan *Paris Agreement* dan membatasi pemanasan global.
- 2) Ketidakpastian Kebijakan:** Ketidakpastian kebijakan AS telah menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di antara negara-negara lain. Beberapa negara mungkin tergoda untuk mengikuti jejak AS dan mengurangi komitmen mereka terhadap pengurangan emisi.
- 3) Polarisasi Politik:** Polarisasi politik yang mendalam di AS dan beberapa negara lain telah mempersulit upaya untuk mencapai konsensus nasional dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini dapat menghambat aksi iklim domestik dan mempengaruhi kerjasama internasional.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya:** Negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Meskipun *Paris Agreement* menetapkan mekanisme pendanaan untuk mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang, dana yang tersedia masih jauh dari memadai.

- 5) Kompleksitas Isu:** Perubahan iklim adalah isu yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan terpadu dan kolaborasi lintas sektor. Mengatasi perubahan iklim memerlukan transformasi sistem energi, transportasi, pertanian, dan penggunaan lahan, yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.

d. Ketahanan Kerjasama Multilateral

Meskipun penarikan diri AS menimbulkan tantangan yang signifikan bagi kerjasama multilateral, rezim iklim internasional telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi. Banyak negara dan aktor non-negara, seperti kota, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil, tetap berkomitmen pada tujuan *Paris Agreement* dan meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Uni Eropa, misalnya, telah mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam negosiasi iklim internasional dan telah membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk memajukan agenda iklim global (Kim, 2017). Tiongkok juga telah meningkatkan investasinya dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama iklim dengan beberapa negara (Wang, 2017).

Selain itu, banyak negara berkembang telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam aksi iklim, meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Mereka telah menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk beralih ke energi bersih dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Ketahanan rezim iklim internasional juga tercemin dalam munculnya berbagai inisiatif dan koalisi baru yang bertujuan untuk memperkuat aksi iklim global. Inisiatif-inisiatif ini, yang melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara, berfokus pada berbagai isu, seperti pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Mereka melengkapi kerangka kerja Perjanjian Paris dan membantu mempertahankan momentum aksi iklim global.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Rezim Iklim Internasional

Efektivitas rezim iklim internasional dalam mengatasi perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Komitmen Politik:** Komitmen politik dari negara-negara untuk memenuhi komitmen mereka di bawah Perjanjian Paris sangat penting

untuk keberhasilan rezim iklim internasional. Tanpa komitmen politik yang kuat, upaya untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim akan terhambat.

- 2) **Kepemimpinan:** Kepemimpinan yang kuat dan efektif diperlukan untuk memobilisasi aksi iklim global dan mengoordinasikan upaya berbagai aktor. Ketiadaan kepemimpinan dapat menghambat kemajuan dan menciptakan ketidakpastian.
- 3) **Kerjasama:** Kerjasama antara negara-negara, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, sangat penting untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, serta koordinasi kebijakan.
- 4) **Partisipasi:** Partisipasi yang luas dari berbagai aktor, termasuk negara-negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, penting untuk keberhasilan rezim iklim internasional. Setiap aktor memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mengatasi perubahan iklim.
- 5) **Pendanaan:** Pendanaan yang memadai diperlukan untuk mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang dan membantu mereka beralih ke energi bersih dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

3. Diplomasi Iklim dan Hubungan Antarnegara

Keputusan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* juga berdampak pada diplomasi iklim dan hubungan antarnegara. Penarikan diri AS telah menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan mengandalkan dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju (Depledge, 2020). Hal ini dapat mempersulit negosiasi iklim internasional dan menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan global dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, penarikan diri AS juga dapat membuka peluang bagi negara-negara lain untuk memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi iklim dan membentuk tatanan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang (Falkner, 2016).

a. Ketegangan dan Pergeseran dalam Hubungan Bilateral

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* telah menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral AS dengan banyak negara, terutama sekutu tradisional dan mitra dagang. Uni Eropa, yang telah lama menjadi mitra dekat AS dalam isu-isu global, telah menyatakan kekecewaan yang mendalam atas keputusan AS dan menegaskan kembali komitmennya pada

Paris Agreement. Beberapa negara anggota Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, bahkan telah mengambil sikap yang lebih keras dan mengkritik AS secara terbuka atas penarikan dirinya. Ketegangan ini dapat memengaruhi kerjasama AS-Uni Eropa dalam isu-isu lain, seperti perdagangan, keamanan, dan diplomasi. Sebagai contoh, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka mengkritik keputusan AS dan menyerukan negara-negara lain untuk tetap bersatu dalam mendukung *Paris Agreement*. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan kerja sama multilateral dalam mengatasi perubahan iklim dan tantangan global lainnya.

Hubungan AS dengan negara-negara berkembang juga telah terpengaruh oleh penarikan dirinya dari *Paris Agreement*. Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mengandalkan dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Penarikan diri AS telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara berkembang bahwa AS tidak lagi bersedia untuk memenuhi komitmennya dalam membantu mereka mengatasi tantangan perubahan iklim. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan kerjasama antara AS dan negara-negara berkembang, dan dapat menghambat upaya global untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*.

Sebagai contoh, beberapa negara kepulauan kecil yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut telah menyatakan keprihatinan mereka atas penarikan diri AS dan menyerukan AS untuk kembali bergabung dengan *Paris Agreement*. Mereka menekankan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial bagi mereka dan bahwa kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Di sisi lain, penarikan diri AS juga telah membuka peluang bagi negara-negara lain, seperti Tiongkok, untuk memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara berkembang. Tiongkok telah meningkatkan investasinya dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon di negara-negara berkembang, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama iklim dengan beberapa negara (Wang, 2017). Hal ini dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok di negara-negara berkembang dan membentuk kembali lanskap geopolitik global. Sebagai contoh, Tiongkok telah meluncurkan inisiatif "Sabuk dan Jalan" yang mencakup investasi dalam infrastruktur energi bersih di negara-negara berkembang di Asia,

Afrika, dan Eropa. Inisiatif ini dapat membantu Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan tersebut.

b. Perubahan Dinamika dalam Negosiasi Iklim Internasional

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga telah mengubah dinamika negosiasi iklim internasional. AS, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia dan penyedia dana utama untuk aksi iklim, memiliki peran penting dalam negosiasi iklim internasional. Ketiadaan AS dalam negosiasi ini telah menciptakan kekosongan kepemimpinan dan ketidakpastian tentang arah masa depan negosiasi iklim.

Beberapa negara, seperti Uni Eropa dan Tiongkok, telah mencoba untuk mengisi kekosongan kepemimpinan ini dan memandu negosiasi iklim internasional. Namun, ketiadaan AS tetap mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan global yang ambisius dan efektif.

Penarikan diri AS juga telah mengubah dinamika kekuatan dalam negosiasi iklim internasional. Negara-negara berkembang, yang sebelumnya seringkali terpinggirkan dalam negosiasi yang didominasi oleh negara-negara maju, kini memiliki lebih banyak ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memengaruhi hasil negosiasi. Hal ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih seimbang dan adil dalam negosiasi iklim internasional, tetapi juga dapat meningkatkan kompleksitas dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan.

Sebagai contoh, pada Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC ke-26 di Glasgow pada tahun 2021, negara-negara berkembang berhasil mendorong isu keadilan iklim dan pendanaan iklim ke dalam agenda utama negosiasi. Mereka menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi komitmen mereka dalam menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk mendukung aksi iklim dan menuntut agar isu kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim dimasukkan dalam negosiasi.

c. Peluang untuk Diplomasi Iklim yang Lebih Inklusif

Meskipun penarikan diri AS menimbulkan tantangan bagi diplomasi iklim, hal ini juga membuka peluang untuk membentuk tatanan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Ketiadaan AS dapat mendorong negara-negara lain untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dan bekerjasama dalam mengatasi perubahan iklim.

Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan keberhasilan aksi iklim global. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan kepentingan mereka dan membentuk agenda iklim global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, penarikan diri AS juga dapat mendorong kemunculan aktor-aktor non-negara, seperti kota, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil, yang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi iklim. Aktor-aktor ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara negara-negara dan mempromosikan aksi iklim di tingkat lokal, nasional, dan global.

Sebagai contoh, banyak kota di seluruh dunia telah menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk beralih ke energi bersih dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan juga semakin aktif dalam mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam operasi bisnis mereka dan berinvestasi dalam teknologi rendah karbon. Organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan memobilisasi dukungan untuk aksi iklim.

d. Strategi untuk Memperkuat Diplomasi Iklim

Untuk memperkuat diplomasi iklim dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penarikan diri AS, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- 1) Memperkuat Kepemimpinan Multilateral:** Negara-negara lain, terutama Uni Eropa dan Tiongkok, perlu mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dalam negosiasi iklim internasional dan bekerjasama untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan aliansi dan koalisi baru, peningkatan koordinasi politik, dan pemberian insentif bagi negara-negara untuk meningkatkan ambisi iklim mereka.
- 2) Meningkatkan Ambisi Iklim:** Negara-negara perlu meningkatkan ambisi iklim mereka dan menetapkan target pengurangan emisi yang lebih agresif. Hal ini akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia bahwa mereka serius dalam mengatasi perubahan iklim dan dapat mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Peningkatan ambisi iklim dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti

memperbarui NDCs, mengadopsi kebijakan iklim yang lebih ketat, dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi.

- 3) **Memobilisasi Pendanaan Iklim:** Negara-negara maju perlu memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk mendukung aksi iklim. Hal ini akan membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan akan membangun kepercayaan dan kerjasama antara negara-negara maju dan berkembang. Mobilisasi pendanaan iklim dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti dana iklim multilateral, bantuan pembangunan resmi, dan investasi swasta.
- 4) **Mempromosikan Kerjasama Teknologi:** Negara-negara perlu bekerjasama untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi rendah karbon. Hal ini akan membantu mempercepat transisi ke energi bersih dan mengurangi emisi global. Kerjasama teknologi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penelitian dan pengembangan bersama, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas.
- 5) **Melibatkan Aktor Non-Negara:** Aktor-aktor non-negara, seperti kota, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil, perlu dilibatkan secara aktif dalam diplomasi iklim. Mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan mempromosikan kesadaran publik. Pelibatan aktor non-negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dialog multi-pemangku kepentingan, kemitraan publik-swasta, dan kampanye advokasi.

4. Dampak Politik Domestik dan Stabilitas Politik Global

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* tidak hanya berdampak pada lanskap politik internasional, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik domestik di AS dan stabilitas politik global secara keseluruhan. Keputusan ini telah memicu perdebatan politik yang sengit di AS dan memperdalam polarisasi antara kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang aksi iklim (Stavins, 2018). Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencapai konsensus nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan memengaruhi stabilitas politik di AS. Selain itu, penarikan diri AS juga dapat berdampak pada stabilitas politik global dengan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan pada komitmen AS terhadap isu-isu global, termasuk

perubahan iklim (Keohane & Victor, 2016). Hal ini dapat melemahkan kohesi internasional dan mempersulit upaya untuk mengatasi tantangan global lainnya.

a. Polarisasi Politik dan Perdebatan Domestik

Isu perubahan iklim telah menjadi isu yang sangat memecah belah dalam politik AS selama beberapa dekade terakhir. Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* telah memperdalam polarisasi ini, dengan Partai Republik umumnya mendukung keputusan tersebut dan Partai Demokrat menentangnya. Perdebatan sengit terjadi di Kongres, media, dan masyarakat sipil mengenai manfaat dan biaya aksi iklim, peran pemerintah dalam mengatur emisi, dan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi AS.

Polarisasi ini telah menghambat upaya untuk mencapai konsensus nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan telah mempersulit peng принятие kebijakan iklim yang komprehensif dan efektif. Beberapa negara bagian dan kota di AS telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan mempromosikan energi bersih, tetapi upaya ini terhambat oleh kurangnya dukungan dari pemerintah federal dan resistensi dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat.

b. Ketidakpastian Kebijakan dan Implikasinya

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga telah menciptakan ketidakpastian kebijakan yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, keputusan ini telah membatalkan beberapa kebijakan iklim yang diadopsi oleh pemerintahan sebelumnya dan telah menimbulkan pertanyaan tentang masa depan regulasi emisi di AS. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan investor, yang membutuhkan kepastian kebijakan untuk merencanakan investasi jangka panjang dalam energi bersih dan teknologi rendah karbon.

Di tingkat internasional, ketidakpastian kebijakan AS telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara negara-negara lain. Beberapa negara mungkin tergoda untuk mengikuti jejak AS dan mengurangi komitmen mereka terhadap pengurangan emisi. Hal ini dapat mengarah pada penurunan ambisi iklim global dan menghambat kemajuan dalam mengatasi perubahan iklim.

c. Dampak terhadap Kredibilitas dan Kepemimpinan AS

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga telah berdampak pada kredibilitas dan kepemimpinan AS di panggung internasional. Keputusan ini telah merusak reputasi AS sebagai pemimpin dalam isu-isu global dan

telah mengurangi kemampuannya untuk memengaruhi negara-negara lain. Beberapa negara mungkin mempertanyakan komitmen AS terhadap kerjasama internasional dan multilateralisme, dan mungkin enggan untuk bekerjasama dengan AS dalam isu-isu lain.

Selain itu, penarikan diri AS juga telah menimbulkan pertanyaan tentang keandalan AS sebagai mitra dalam perjanjian internasional. Beberapa negara mungkin ragu untuk menandatangani perjanjian baru dengan AS, karena khawatir bahwa AS dapat menarik diri dari perjanjian tersebut di masa depan. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan global dalam isu-isu penting lainnya, seperti perdagangan, keamanan, dan non-proliferasi senjata nuklir.

d. Implikasi bagi Stabilitas Politik Global

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi stabilitas politik global. Perubahan iklim merupakan ancaman global yang memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* dapat melemahkan kerjasama internasional dan meningkatkan risiko konflik dan ketidakstabilan.

Perubahan iklim dapat memicu konflik dan ketidakstabilan melalui berbagai cara. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan migrasi massal, persaingan atas sumber daya, dan ketegangan sosial. Hal ini dapat memicu konflik antara negara-negara dan komunitas, dan dapat menggoyahkan stabilitas politik di negara-negara yang rentan.

Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* dapat memperburuk risiko ini dengan melemahkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Ketiadaan kepemimpinan AS dapat menghambat upaya untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Hal ini dapat meningkatkan risiko dampak perubahan iklim yang lebih parah, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan ketidakstabilan.

e. Strategi untuk Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh penarikan diri AS dari *Paris Agreement*, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1) Memperkuat Kerjasama Multilateral: Negara-negara lain perlu memperkuat kerjasama multilateral dan menegaskan kembali

komitmen mereka pada *Paris Agreement*. Mereka perlu bekerjasama untuk mencapai tujuan perjanjian, meskipun ketiadaan AS.

- 2) **Meningkatkan Aksi Iklim Domestik:** Negara-negara perlu meningkatkan aksi iklim domestik mereka dan menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius. Hal ini akan membantu mengurangi emisi global dan menunjukkan komitmen mereka terhadap aksi iklim.
- 3) **Memobilisasi Pendanaan Iklim:** Negara-negara maju perlu memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk mendukung aksi iklim. Hal ini akan membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.
- 4) **Mempromosikan Kerjasama Teknologi:** Negara-negara perlu bekerjasama untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi rendah karbon. Hal ini akan membantu mempercepat transisi ke energi bersih dan mengurangi emisi global.
- 5) **Melibatkan Aktor Non-Negara:** Aktor-aktor non-negara, seperti kota, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil, perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan mempromosikan kesadaran publik.

D. Kesimpulan

Keluarnya AS dari *Paris Agreement* memiliki implikasi politik yang luas dan kompleks, baik di tingkat domestik maupun global. Keputusan ini berdampak pada kepemimpinan global, kerjasama multilateral, diplomasi iklim, dan stabilitas politik. Meskipun penarikan diri AS menimbulkan tantangan yang signifikan, hal ini juga membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola iklim global dan membentuk tatanan global yang baru. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam dinamika politik yang mendasari isu perubahan iklim global dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

REFERENSI

- Bodansky, D. (2016). The Paris Climate Change Agreement: A New Hope? *American Journal of International Law*, 110(2), 288-319.
- Cai, W., Xu, C., Cao, L., & Zhang, W. (2020). China's role in global climate governance: Towards a more proactive and responsible approach. *Journal of Environmental Management*, 265, 110508.
- Depledge, J. (2020). *The Paris Agreement: A Commentary*. Oxford University Press.
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics. *International Affairs*, 92(5), 1107-1125.
- Ge, M., Friedrich, J., & Damassa, T. (2014). 600 Million Chinese to live in cities threatened by rising sea levels. *Natural Hazards*, 73(2), 669-675.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and Discord in Global Climate Policy. *Nature Climate Change*, 6(6), 570-575.
- Kim, R. E. (2017). US withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Politics and Governance*, 5(3), 156-163.
- Lesnikowski, A. C., Meckling, J., & Hughes, L. (2015). A pathway for the Paris Agreement to catalyze action. *Nature Climate Change*, 5(10), 915-917.
- Markandya, A., & González-Eguino, M. (2019). Integrated assessment for identifying climate-compatible development pathways: A review. *Environmental Science & Policy*, 92, 144-153.
- Obergassel, W., Arens, C., Hermwille, L., Kreibich, N., & Mersmann, F. (2016). Phoenix from the ashes? Assessing the implications of the Paris Agreement for the future of international climate policy. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 25(3), 285-301.
- Rajamani, L. (2016). Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative possibilities and underlying politics. *International & Comparative Law Quarterly*, 65(2), 493-514.
- Saran, S. (2021). The Paris Agreement: A pact to save the planet. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 77(2), 147-160.
- Stavins, R. N. (2018). The Paris Agreement and Beyond: International Climate Policy after Trump. *Environmental and Energy Law & Policy Journal*, 13(1), 1-24.
- UNFCCC. (2015). *Paris Agreement*.
- Wang, X. (2017). The Paris Agreement on climate change: Analysis and implications. *China Economic Journal*, 10(3), 263-278.

- Zhang, Z. (2016). The Paris Agreement on climate change: A Chinese perspective. *China International Strategy Review*, 2(1), 58-73.